

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Khususnya Untuk Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pidana mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana mati diatur di dalam “Pasal 113”, “Pasal 114”, “Pasal 116”, “Pasal 118”, “Pasal 119”, “Pasal 121”, “Pasal 132”, “Pasal 133”, dan “Pasal 144”. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati hanya diatur dalam “Pasal 2 “. Mekanisme pelaksanaan pidana mati terdapat dalam “Pasal 2 - Pasal 16” Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 dan Tata cara pelaksanaan pidana mati terdapat dalam “Pasal 15” Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pidana Mati

ABSTRACT

Juridical Review Against The Criminal Dead For Narcotics And Corruption In Indonesia. This research aims to find out how the criminal setting die in Indonesia especially for the crime of narcotics and criminal acts of corruption and to find out how the arrangements implementing the criminal dead in Indonesia.

This research uses the juridical normative method, with secondary engineering data collection. The Secondary data itself consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this research in Act No. 35 of the year 2009 About Narcotics, criminal dead set in "article 113", Article 114", "article 116", "article", "118 Article 119", "article 121", "article 132 Article 133", "", and "article 144" and criminal Dead On Act No. 20 Year 2001 Jo Act No. 31 of the year 1999 is only regulated in the "article 2". Mecanism implementation of the dead criminal "contained in Article 2 to article 16" Act No. 2 Pnps Years 1964 and the procedures for the execution of criminal death contained in the "article 15" Regulation No. 12-year Assistant 2010.

Keywords: Juridical Review, The Criminal Dead